

Sistem Pemerintahan Kesultanan Buton Dalam Perspektif Sarana Wolio Di Wilayah Kesultanan Buton

Oleh : Tanzil, Juhaepa, Sarpin

^{1,2,3} Sosiologi FISIP Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Abstract.

This study examines the government system of the Buton Sultanate through the lens of Sarana Wolio, focusing on its institutional structure, leadership preparation and recruitment, deliberative processes, and oversight of government administration. It adopts a qualitative approach with a descriptive-interpretive design and was conducted in Baubau City, Southeast Sulawesi, Indonesia. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants were purposively selected based on their knowledge of and involvement in the history, customary practices, and institutions of the Buton Sultanate. Data were analyzed through organization, thematic categorization, presentation, and interpretation. The findings reveal that the government system of the Buton Sultanate is supported by an institutional structure linking Sarana Wolio with Pangka, Siolimbona, Sarana Hukumu, and other governing bodies. Leadership preparation involves regeneration and familiarization with customary practices and governance, while leaders are selected through established institutional mechanisms. Deliberation plays a central role in decision-making, while Siolimbona serves an oversight function. These findings highlight the relevance of Sarana Wolio as an analytical framework for understanding interinstitutional relations, the distribution of authority, leadership, deliberation, and oversight within the government system of the Buton Sultanate. This study contributes to the fields of governance, local politics, and traditional institutional studies. It also provides a basis for further research on customary-based governance and the relationship between customary norms and religious values. Furthermore, digital documentation and archiving offer opportunities to preserve and promote the use of the Buton Sultanate's institutional knowledge for educational and research purposes.

Keywords: *Sarana Wolio; Buton Sultanate; government system; deliberation; supervision.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem pemerintahan Kesultanan Buton dalam perspektif Sarana Wolio, dengan perhatian pada struktur kelembagaan, penyiapan dan rekrutmen kepemimpinan, mekanisme musyawarah, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-interpretatif yang dilaksanakan di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka terhadap sejarah, adat, dan kelembagaan Kesultanan Buton. Analisis data dilakukan melalui pengorganisasian data, pengelompokan tema, penyajian data, dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Kesultanan Buton ditopang oleh struktur kelembagaan yang menghubungkan Sarana Wolio dengan Pangka, Siolimbona, Sarana Hukumu, dan perangkat pemerintahan lainnya. Penyiapan kepemimpinan berlangsung melalui kaderisasi dan pengenalan terhadap adat serta tata pemerintahan, sedangkan penetapan pemimpin dilakukan melalui mekanisme kelembagaan. Musyawarah menjadi mekanisme penting dalam pengambilan keputusan, sementara Siolimbona menjalankan fungsi pengawasan. Temuan ini menempatkan Sarana Wolio sebagai perspektif untuk memahami keterkaitan kelembagaan, pembagian kewenangan, kepemimpinan, musyawarah, dan pengawasan. Kajian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pemerintahan, politik lokal, dan kajian kelembagaan tradisional serta dapat menjadi referensi penelitian lanjutan tentang tata kelola berbasis adat dan hubungan norma adat dengan nilai keagamaan. Dokumentasi dan pengarsipan digital juga berpotensi mendukung pelestarian serta pemanfaatan pengetahuan kelembagaan Kesultanan Buton untuk pendidikan dan penelitian.

Kata Kunci : Sarana Wolio; Kesultanan Buton; sistem pemerintahan; musyawarah; pengawasan

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan tradisional di Indonesia berkembang dalam kerangka sosial dan budaya masyarakat setempat. Kerajaan dan kesultanan tidak hanya berfungsi sebagai struktur kekuasaan, tetapi juga menjadi ruang tempat nilai-nilai sosial, budaya, dan politik lokal diorganisasikan dalam kehidupan masyarakat. Tata pemerintahan lokal dapat dipahami sebagai bagian dari perkembangan budaya politik yang memiliki karakteristik sesuai dengan lingkungan sosial dan sejarah masyarakat pendukungnya (Zuhro 2018). Kesultanan Buton merupakan salah satu entitas politik tradisional di kawasan Sulawesi Tenggara yang memiliki pengalaman pemerintahan dan kelembagaan yang berkembang dalam lingkungan budaya Wolio. Sistem pemerintahan Kesultanan Buton tidak hanya bertumpu pada kedudukan Sultan, tetapi juga melibatkan sejumlah perangkat kelembagaan yang mengatur hubungan kekuasaan, pembagian kewenangan, kehidupan adat, dan pelaksanaan pemerintahan. Dalam struktur tersebut dikenal Sarana Wolio, Pangka, Siolimbona, Sarana Hukumu, serta perangkat pemerintahan lainnya. Keberadaan berbagai perangkat tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berlangsung melalui struktur kelembagaan yang memiliki fungsi dan kewenangan tertentu (Rosdin 2015). Pentingnya kajian ini terletak pada upaya memahami bagaimana sistem pemerintahan Kesultanan Buton mengatur kekuasaan melalui kelembagaan, adat, dan nilai keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Wolio. Pemahaman ini tidak cukup hanya dengan melihat struktur pemerintahan atau kedudukan Sultan, tetapi perlu menelaah bagaimana kewenangan dibagi, pemimpin disiapkan dan ditetapkan, keputusan diambil melalui musyawarah, serta pemerintahan diawasi. Karena itu, Sarana Wolio dikaji sebagai perspektif untuk memahami keterkaitan berbagai mekanisme tersebut sekaligus memperkaya pengetahuan tentang keragaman tata pemerintahan lokal di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan Sarana Wolio sebagai perspektif analitis untuk memahami sistem pemerintahan Kesultanan Buton secara lebih menyeluruh. Perspektif ini memungkinkan struktur dan fungsi kelembagaan, pembagian kewenangan, penyiapan dan rekrutmen kepemimpinan, musyawarah, serta pengawasan kekuasaan dikaji sebagai unsur-unsur yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sarana Wolio tidak hanya dipahami dalam konteks susunan kelembagaan atau kedudukan Sultan, tetapi juga sebagai kerangka untuk menelaah hubungan antara norma adat, nilai keagamaan, legitimasi kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kekuasaan dalam tata pemerintahan Kesultanan Buton. Penempatan Sarana Wolio sebagai perspektif analitis tersebut sejalan dengan pandangan bahwa sistem pemerintahan tradisional perlu dipahami dalam kaitannya dengan nilai, norma, dan budaya politik yang berkembang dalam masyarakat.

Perspektif budaya politik lokal, keberadaan institusi pemerintahan tradisional penting dipahami tidak hanya dari aspek struktur formal kekuasaan, tetapi juga dari nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai lokal dapat menjadi bagian dari mekanisme yang mengatur hubungan antara pemimpin, lembaga, dan masyarakat. Kajian mengenai demokrasi lokal dan perubahan nilai-nilai budaya politik menunjukkan bahwa praktik politik pada tingkat lokal memiliki hubungan dengan nilai, tradisi, dan struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat (Zuhro 2018). Untuk itu, pemahaman terhadap sistem pemerintahan Kesultanan Buton perlu memperhatikan keterkaitan antara kelembagaan pemerintahan dengan nilai sosial dan budaya masyarakat Wolio.

Sarana Wolio menempati posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkungan Kesultanan Buton. Sarana Wolio tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan berbagai perangkat pemerintahan dan kelembagaan lainnya. Struktur wilayah yang mencakup Sara Wolio, Barata, dan Kadie juga memperlihatkan adanya pengaturan hubungan antara pemerintahan pusat dan wilayah di bawahnya. Kajian mengenai Sarana Wolio perlu ditempatkan dalam keseluruhan sistem pemerintahan agar dapat diketahui bagaimana struktur, fungsi, dan hubungan antarlembaga berlangsung dalam penyelenggaraan pemerintahan Kesultanan Buton (Razaq, Jika, and Hijriah 2022). Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menempatkan Sarana Wolio sebagai perspektif untuk membaca sistem pemerintahan Kesultanan Buton secara terpadu, dengan menghubungkan struktur dan fungsi kelembagaan, hubungan antarlembaga, pembagian kewenangan, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini cenderung dibahas secara terpisah.

Selain struktur kelembagaan, aspek kepemimpinan merupakan bagian penting dalam memahami sistem pemerintahan Kesultanan Buton. Penyiapan pemimpin tidak semata-mata berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam struktur sosial, tetapi juga berkaitan dengan pengalaman, pengenalan terhadap adat, tanggung jawab pemerintahan, dan penerimaan dalam lingkungan kelembagaan kesultanan. Proses pembentukan kepemimpinan dan hubungan antara pemimpin dengan masyarakat, dalam konteks budaya politik lokal merupakan bagian dari dinamika nilai politik yang berkembang dalam suatu lingkungan sosial tertentu (Zuhro 2018) .

Mekanisme pengambilan keputusan juga menjadi aspek penting dalam sistem pemerintahan tersebut. Musyawarah merupakan salah satu mekanisme yang digunakan dalam kehidupan pemerintahan dan sosial masyarakat. Dalam kerangka budaya demokrasi, musyawarah berkaitan dengan proses membangun kesepakatan dan menghubungkan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat (Zuhro 2018). Dalam konteks Kesultanan Buton,

praktik musyawarah perlu dilihat dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan tokoh yang memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan.

Aspek lain yang penting adalah pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan. Keberadaan Siolimbona dan perangkat kelembagaan lainnya menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Sultan, tetapi juga dengan adanya mekanisme kelembagaan yang mengatur dan mengawasi jalannya pemerintahan. Perspektif budaya politik lokal, hubungan antara kekuasaan, norma, dan kelembagaan merupakan bagian penting dalam memahami bagaimana suatu sistem politik lokal mempertahankan keteraturan dan legitimasi dalam masyarakat (Zuhro 2018).

Sejumlah kajian mengenai masyarakat dan politik lokal telah memberikan perhatian terhadap hubungan antara nilai budaya, struktur sosial, dan praktik politik di tingkat lokal (Zuhro 2018). Namun, pembahasan mengenai Kesultanan Buton masih perlu melihat secara lebih terpadu hubungan antara struktur kelembagaan, penyiapan dan rekrutmen kepemimpinan, mekanisme musyawarah, serta pengawasan kekuasaan dalam satu kerangka analisis. Pendekatan tersebut penting agar sistem pemerintahan Kesultanan Buton tidak hanya dipahami berdasarkan kedudukan Sultan, tetapi juga berdasarkan perangkat kelembagaan dan mekanisme yang mengatur penggunaan kekuasaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis sistem pemerintahan Kesultanan Buton dalam perspektif Sarana Wolio, dengan perhatian pada struktur kelembagaan, penyiapan dan rekrutmen kepemimpinan, mekanisme musyawarah, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-interpretatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam praktik kelembagaan, hubungan antarlembaga, proses kepemimpinan, mekanisme musyawarah, dan pengawasan dalam sistem pemerintahan Kesultanan Buton berdasarkan perspektif para pelaku dan informan yang memahami konteks sejarah serta kelembagaan kesultanan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial dalam konteks alamiahnya melalui penggalian informasi secara mendalam dari pengalaman, pengetahuan, dan pandangan informan ((Dr. Abdul Fattah Nasution 2023). Desain deskriptif-interpretatif digunakan untuk menggambarkan dan menafsirkan sistem pemerintahan Kesultanan Buton berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena Kota Baubau merupakan wilayah yang memiliki keterkaitan historis dengan pusat pemerintahan Kesultanan Buton dan menjadi lokasi penting dalam keberadaan serta keberlanjutan pengetahuan mengenai kelembagaan dan tradisi pemerintahan Kesultanan Buton. Informan penelitian dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka terhadap sejarah, adat, budaya, dan kelembagaan Kesultanan Buton. Informan mencakup tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerhati sejarah dan budaya, serta pihak lain yang memiliki pengetahuan mengenai Sarana Wolio dan sistem pemerintahan Kesultanan Buton. Pemilihan informan secara purposif memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari individu yang dinilai memiliki pengetahuan relevan dengan fokus penelitian (Ayton, Tsindos, and Berkovic 2023).

Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai Sarana Wolio, hubungan antarlembaga pemerintahan, proses penyiapan dan kaderisasi kepemimpinan, mekanisme rekrutmen dan penetapan Sultan, praktik musyawarah, serta mekanisme pengawasan pemerintahan. Wawancara dilakukan secara terbuka dan fleksibel agar peneliti dapat menggali informasi lebih lanjut berdasarkan jawaban informan. Wawancara mendalam merupakan salah satu teknik penting dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai pengalaman, pengetahuan, dan pandangan informan terhadap fenomena yang diteliti (Ayton, Tsindos, and Berkovic 2023).

Observasi digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai konteks sosial dan budaya yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dilakukan dengan memperhatikan praktik, lingkungan sosial, simbol, aktivitas, dan bentuk interaksi yang berkaitan dengan keberadaan kelembagaan serta tradisi Kesultanan Buton. Penggunaan observasi dalam penelitian sosial memungkinkan peneliti memperoleh informasi melalui pengamatan langsung terhadap konteks kehidupan sosial yang diteliti (Ayton, Tsindos, and Berkovic 2023).

Dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan sejarah dan sistem pemerintahan Kesultanan Buton, khususnya dokumen atau bahan yang memberikan informasi mengenai Sarana Wolio, Pangka, Siolimbona, Sarana Hukumu, struktur pemerintahan, serta praktik pemerintahan kesultanan. Dokumentasi digunakan sebagai sumber data sekunder sekaligus sebagai bahan untuk memperkuat informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Penggunaan berbagai sumber data dalam penelitian kualitatif membantu memperoleh gambaran fenomena secara lebih utuh (Dr. Abdul Fattah Nasution 2023).

Penelitian difokuskan pada lima aspek utama, yaitu: (1) struktur dan kelembagaan pemerintahan Kesultanan Buton; (2) penyiapan dan kaderisasi kepemimpinan; (3) mekanisme rekrutmen dan penetapan Sultan; (4) musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan; dan (5) pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kelima aspek tersebut dianalisis secara terpadu untuk memahami bagaimana Sarana Wolio berkaitan dengan struktur pemerintahan, proses kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan pengawasan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Kesultanan Buton.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif melalui beberapa tahapan, yaitu pengorganisasian data, pengelompokan informasi berdasarkan fokus penelitian, penyajian data, dan interpretasi (Sudiyanti 2024). Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu diorganisasikan sesuai dengan tema penelitian, kemudian dibandingkan untuk menemukan pola, hubungan antarlembaga, serta makna yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Kesultanan Buton. Pengelompokan data diarahkan pada lima fokus penelitian, yaitu struktur kelembagaan, kaderisasi dan kepemimpinan, rekrutmen dan penetapan Sultan, musyawarah, serta pengawasan. Interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kelembagaan Kesultanan Buton sehingga hasil penelitian tidak hanya berupa deskripsi mengenai perangkat pemerintahan, tetapi juga menjelaskan keterkaitan fungsi dan mekanisme antarlembaga. Pengorganisasian dan interpretasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena sosial yang diteliti

PEMBAHASAN

Sarana Wolio sebagai Struktur Pemerintahan Kesultanan Buton

Sarana Wolio merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan Kesultanan Buton yang mengatur pembagian tugas, fungsi, dan hubungan antarlembaga pemerintahan. Dalam struktur pemerintahan Kesultanan Buton, Sarana Wolio berkaitan dengan perangkat pemerintahan pusat, termasuk Sultan, Pangka, Siolimbona, Sarana Hukumu, dan perangkat lainnya. Struktur tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Kesultanan Buton tidak hanya bertumpu pada figur Sultan, tetapi berlangsung melalui sejumlah lembaga yang memiliki fungsi tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kajian mengenai Sarana Wolio menunjukkan bahwa aturan tersebut berfungsi sebagai dasar pengaturan struktur birokrasi dan pembagian tugas dalam pemerintahan Kesultanan Buton (Al Mujabuddawat 2015).

Sarana Wolio juga berkaitan dengan pembagian wilayah pemerintahan Kesultanan Buton. Pemerintahan pusat berada pada wilayah Wolio, sedangkan wilayah Kadie dan Barata memiliki

kedudukan serta fungsi pemerintahan tertentu dalam hubungan dengan pusat kesultanan. Sumber mengenai struktur pemerintahan Kesultanan Buton menunjukkan adanya tiga tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat Sarana Wolio, pemerintahan wilayah Sarana Kadie, dan pemerintahan Barata. Pada tingkat pusat terdapat Sultan, badan Sarana Wolio, serta perangkat khusus kesultanan, sedangkan wilayah Kadie dan Barata memiliki perangkat pemerintahan masing-masing (Ilyas 2017).

Keberadaan struktur tersebut menunjukkan adanya pembagian kewenangan secara bertingkat. Wilayah Wolio menjadi pusat pemerintahan, sedangkan Kadie merupakan wilayah pemerintahan di luar pusat dan Barata merupakan wilayah yang memiliki hubungan khusus dengan pemerintahan pusat. Dengan demikian, sistem pemerintahan Kesultanan Buton memperlihatkan adanya pengaturan hubungan antara pusat dan wilayah melalui perangkat kelembagaan yang berbeda. Sarana Wolio tidak hanya dapat dipahami sebagai nama suatu lembaga, tetapi sebagai bagian dari tata pemerintahan yang menghubungkan berbagai perangkat kekuasaan. Struktur tersebut berkembang sejalan dengan proses pembentukan Kesultanan Buton sebagai kerajaan Islam. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Buton mengalami perkembangan yang mengintegrasikan tradisi lokal dengan unsur-unsur Islam dalam tata sosial dan politik masyarakat ((Alifudin, Chaer, and Suud 2020).

Naskah Sarana Wolio juga memperlihatkan bahwa pengaturan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari nilai keagamaan dan pandangan hidup masyarakat Buton. Kajian terhadap teks Sarana Wolio menunjukkan adanya pengaruh Islam terhadap kebudayaan lokal Buton dan hubungan antara nilai Islam dengan struktur serta norma kehidupan masyarakat. Dengan demikian, Sarana Wolio dapat dipahami sebagai bagian dari proses pelebagaan nilai adat dan Islam dalam sistem pemerintahan Kesultanan Buton (Muhammad Alifuddin n.d.; Niampe 2013).

Kaderisasi dan Penyiapan Kepemimpinan

Penyiapan kepemimpinan dalam Kesultanan Buton berlangsung melalui proses yang tidak hanya berkaitan dengan garis keturunan, tetapi juga dengan penguasaan adat, pengalaman dalam pemerintahan, serta pembentukan karakter kepemimpinan. Kepemimpinan ditempatkan dalam lingkungan sosial dan kelembagaan yang memungkinkan seseorang memperoleh pengalaman mengenai tata pemerintahan dan nilai-nilai yang berlaku dalam kesultanan. Kajian mengenai Sultan La Elangi menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam pemerintahan Wolio berkaitan dengan sejumlah persyaratan karakter dan kapasitas kepemimpinan. Pemimpin diharapkan memiliki keberanian, kemampuan menjalankan adat, kewibawaan, kemampuan mengendalikan diri, serta kemampuan menjalankan perintah dan tanggung jawab pemerintahan. Persyaratan tersebut

menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak semata-mata dipahami berdasarkan kedudukan sosial, tetapi juga berkaitan dengan karakter dan kemampuan seseorang dalam menjalankan pemerintahan (Iriani and Sritirm 2021).

Proses penyiapan kepemimpinan juga dapat dilihat dari keterlibatan seseorang dalam lingkungan pemerintahan dan kehidupan sosial kesultanan. Pengalaman menjalankan tugas pemerintahan, memahami adat, serta berinteraksi dengan perangkat kesultanan menjadi bagian dari proses pembentukan kapasitas kepemimpinan. Dalam konteks tersebut, kaderisasi dapat berlangsung melalui pengalaman formal dalam pemerintahan maupun proses pembelajaran sosial yang berkembang dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Kesultanan Buton memiliki dimensi sosial dan kultural. Seorang calon pemimpin tidak hanya dituntut memiliki kedudukan tertentu, tetapi juga harus memiliki pemahaman terhadap norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Hubungan antara Islam dan budaya lokal yang berkembang dalam masyarakat Buton turut memberikan konteks terhadap pembentukan nilai kepemimpinan dan tata kehidupan sosial (Muhammad Alifuddin n.d.; Niampe 2013).

Kaderisasi kepemimpinan dalam perspektif Sarana Wolio dapat dipahami sebagai proses pembentukan kesiapan seseorang untuk menjalankan kewenangan dalam lingkungan pemerintahan. Kaderisasi tersebut menghubungkan pengalaman pemerintahan, penguasaan adat, nilai keagamaan, dan penerimaan sosial sebagai bagian dari proses penyiapan pemimpin.

Rekrutmen dan Penetapan Sultan

Rekrutmen sultan dalam Kesultanan Buton memperlihatkan adanya mekanisme kelembagaan yang membedakannya dari pola pewarisan kekuasaan secara langsung. Sejak masa Sultan La Elangi, kedudukan Sultan tidak semata-mata ditentukan oleh prinsip putra mahkota, tetapi melalui proses pemilihan yang melibatkan dewan ahli adat yang dikenal sebagai Siolimbona. Meskipun calon Sultan berasal dari lingkungan bangsawan tertentu, proses penetapannya tetap melibatkan mekanisme kelembagaan (Niampe 2013).

Kedudukan Siolimbona dalam proses tersebut menunjukkan bahwa penetapan Sultan berkaitan dengan hubungan antara status sosial dan mekanisme kelembagaan. Kajian mengenai La Elangi menunjukkan bahwa Sultan merupakan pemimpin tertinggi dalam pemerintahan Wolio, tetapi pengangkatannya melibatkan Siolimbona sebagai dewan ahli adat. Hubungan tersebut juga menunjukkan adanya posisi kelembagaan yang memungkinkan pihak yang memiliki kewenangan adat melakukan proses pemilihan dan pengangkatan Sultan (Iriani and Sritirm 2021). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan dalam Kesultanan Buton memiliki

beberapa unsur yang saling berkaitan. Status dalam lingkungan bangsawan menjadi salah satu dasar pencalonan, tetapi penetapan pemimpin tetap berada dalam proses kelembagaan. Dengan demikian, kedudukan Sultan tidak hanya berkaitan dengan asal-usul keluarga, tetapi juga dengan penerimaan dan keputusan lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut.

Persyaratan kepemimpinan juga berkaitan dengan karakter dan kemampuan menjalankan adat. Dalam sumber mengenai pemerintahan Buton, calon pejabat atau pemimpin dituntut memiliki sejumlah kualitas seperti kewibawaan, keberanian, kemampuan menjalankan adat, kemampuan mengendalikan diri, serta kemampuan memperoleh ketaatan masyarakat (Rosdin 2015). Hal tersebut memperlihatkan bahwa proses rekrutmen pemimpin mempertimbangkan kualitas personal sekaligus kedudukan sosial dan kelembagaan. Dalam perspektif Sarana Wolio, proses tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan Sultan berada dalam hubungan dengan lembaga-lembaga lain. Sultan memang menempati posisi tertinggi, tetapi proses memperoleh dan menjalankan kedudukan tersebut berada dalam lingkungan aturan dan kelembagaan kesultanan. Dengan demikian, rekrutmen Sultan merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan yang menghubungkan status sosial, adat, karakter kepemimpinan, dan kewenangan institusional.

Musyawarah sebagai Mekanisme Pengambilan Keputusan

Musyawarah merupakan salah satu unsur penting dalam tata pemerintahan Kesultanan Buton. Pengambilan keputusan tidak hanya berkaitan dengan kewenangan pemimpin, tetapi juga melibatkan pertimbangan dari pihak-pihak yang memiliki kedudukan dalam struktur pemerintahan dan adat. Praktik tersebut menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan ditempatkan dalam hubungan antara kepemimpinan dan kelembagaan. Dalam perkembangan budaya politik Buton, musyawarah berkaitan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan struktur pemerintahan. Kajian mengenai budaya politik Buton menunjukkan adanya pelembagaan musyawarah dalam sistem pemerintahan Sarana Wolio. Musyawarah menjadi bagian dari mekanisme untuk mempertemukan kepentingan dan pandangan berbagai unsur pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan (Faharudin et al. 2022).

Praktik musyawarah tersebut juga memperlihatkan bahwa keputusan politik tidak selalu dipahami sebagai hasil dari suara terbanyak. Dalam beberapa proses pemilihan di tingkat pemerintahan wilayah, terdapat pertimbangan mengenai kesepakatan bersama sehingga dukungan mayoritas belum tentu menjadi satu-satunya dasar untuk menetapkan seseorang sebagai pemimpin. Musyawarah juga memiliki fungsi untuk menjaga hubungan antara pemimpin dan unsur pemerintahan lainnya. Melalui forum musyawarah, keputusan dapat dibicarakan dan dipertimbangkan sebelum dilaksanakan. Dengan demikian, musyawarah bukan hanya mekanisme

teknis pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi bagian dari proses memperoleh legitimasi sosial dan kelembagaan (Niampe 2013; Razaq, Jika, and Hijriah 2022).

Pengawasan Kekuasaan dalam Sarana Wolio

Sistem pemerintahan Kesultanan Buton juga menunjukkan adanya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan. Siolimbona memiliki kedudukan penting dalam lingkungan pemerintahan karena berkaitan dengan pemeliharaan adat dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Keberadaan lembaga tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan Sultan berada dalam hubungan dengan perangkat pemerintahan dan adat lainnya. Dalam struktur pemerintahan Kesultanan Buton, Siolimbona dikenal sebagai kelompok yang memiliki penguasaan terhadap adat dan memiliki tugas untuk menjaganya. Sementara itu, Sarana Hukumu memiliki fungsi yang berkaitan dengan urusan agama Islam. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan memiliki perangkat yang menjalankan fungsi berbeda dan saling berhubungan dalam penyelenggaraan kesultanan (Ilyas 2017; Razaq, Jika, and Hijriah 2022).

Hubungan antara Sultan dan Siolimbona juga memperlihatkan adanya mekanisme pembatasan terhadap kekuasaan. Dalam kajian mengenai La Elangi, Sultan digambarkan sebagai pihak yang dipilih dan diangkat oleh dewan ahli adat Siolimbona. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Sultan memiliki keterkaitan dengan lembaga adat yang memiliki kewenangan dalam proses pengangkatan pemimpin (Iriani and Sritirm 2021). Keberadaan mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa Sarana Wolio memiliki dimensi pengaturan kekuasaan. Struktur kelembagaan, aturan adat, dan nilai keagamaan secara bersama-sama membentuk lingkungan yang mengatur bagaimana kewenangan pemerintahan dijalankan. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme menjaga keteraturan pemerintahan.

Sarana Wolio sebagai Kerangka Tata Kelola Pemerintahan

Berdasarkan keseluruhan temuan, Sarana Wolio dapat dipahami sebagai kerangka kelembagaan yang memperlihatkan keterkaitan antara struktur pemerintahan, kepemimpinan, musyawarah, dan pengawasan. Sarana Wolio tidak hanya menunjukkan keberadaan perangkat pemerintahan, tetapi juga menggambarkan pembagian fungsi dan hubungan kewenangan di antara lembaga-lembaga dalam Kesultanan Buton. Keberadaan Martabat Tujuh dan Sarana Wolio memperlihatkan bahwa pengaturan pemerintahan Kesultanan Buton memiliki landasan normatif yang menghubungkan struktur politik dengan nilai keagamaan. Kajian mengenai Sarana Wolio menunjukkan bahwa naskah tersebut menjadi landasan penting dalam pengaturan struktur pemerintahan dan pembagian tugas pejabat kesultanan. Struktur tersebut berkembang dalam

proses pelebagaan pemerintahan pada masa Sultan Dayanu Ikhsanuddin atau La Elangi (Iriani and Sritirm 2021).

Integrasi antara adat dan Islam juga menjadi ciri penting dalam perkembangan pemerintahan Kesultanan Buton. Islam tidak hanya berkembang sebagai agama, tetapi berinteraksi dengan kebudayaan lokal dan memengaruhi struktur sosial serta tata kehidupan masyarakat. Kajian mengenai transformasi Islam dalam sistem sosial budaya orang Buton menunjukkan bahwa proses Islamisasi berlangsung dalam hubungan dengan sistem sosial dan budaya lokal. Hal yang sama terlihat dalam kajian terhadap teks Sarana Wolio yang menunjukkan adanya pengaruh Islam terhadap kebudayaan lokal Buton (Niampe 2013).

Dengan demikian, sistem pemerintahan Kesultanan Buton dapat dipahami sebagai sistem yang mempertemukan beberapa unsur. Struktur kelembagaan menyediakan pembagian fungsi dan kewenangan; kaderisasi menyediakan proses penyiapan kepemimpinan; mekanisme rekrutmen memberikan prosedur bagi penetapan pemimpin; musyawarah menyediakan ruang pertimbangan bersama; sedangkan pengawasan menjaga agar kewenangan pemerintahan tetap berada dalam batas norma dan kelembagaan. Perspektif Sarana Wolio dengan demikian memberikan ruang untuk memahami pemerintahan Kesultanan Buton secara lebih menyeluruh. Pemerintahan tidak hanya dilihat dari kedudukan Sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tetapi juga dari jaringan kelembagaan yang mengatur hubungan antara Sultan, Pangka, Siolimbona, Sarana Hukumu, dan perangkat pemerintahan lainnya. Dalam kerangka tersebut, tata pemerintahan merupakan hasil hubungan antara kekuasaan politik, adat, agama, dan struktur sosial masyarakat Buton (Apurines, Muradi, and Kartini 2018).

PENUTUP

Sistem pemerintahan Kesultanan Buton menunjukkan adanya tata kelola pemerintahan yang tersusun melalui pembagian struktur, fungsi, dan kewenangan antarlembaga. Dalam struktur tersebut, Sarana Wolio menempati posisi penting sebagai bagian dari kelembagaan pemerintahan pusat yang berhubungan dengan Pangka, Siolimbona, Sarana Hukumu, serta perangkat pemerintahan lainnya. Struktur wilayah yang mencakup Sara Wolio, Barata, dan Kadie memperlihatkan adanya pengaturan hubungan antara pemerintahan pusat dan wilayah di bawahnya. Dengan demikian, pemerintahan Kesultanan Buton tidak berlangsung secara sederhana, tetapi ditopang oleh perangkat kelembagaan yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing.

Dalam perspektif Sarana Wolio, keberlangsungan pemerintahan juga ditunjukkan melalui mekanisme penyiapan dan rekrutmen kepemimpinan. Kaderisasi tidak hanya berkaitan dengan pencalonan seseorang untuk menduduki jabatan, tetapi berlangsung melalui proses pengenalan

terhadap adat, tata pemerintahan, tanggung jawab kepemimpinan, dan nilai-nilai yang berlaku dalam Kesultanan Buton. Penetapan pemimpin, termasuk Sultan, ditempatkan dalam mekanisme kelembagaan dan pertimbangan bersama sehingga kedudukan kepemimpinan tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan individual.

Pengambilan keputusan dalam pemerintahan Kesultanan Buton menempatkan musyawarah sebagai mekanisme penting. Musyawarah diarahkan pada tercapainya mufakat dan tidak semata-mata didasarkan pada perolehan suara terbanyak. Praktik tersebut terlihat dalam proses pemilihan pemimpin di tingkat Kadie serta pertemuan Sultan dengan para pemimpin dan masyarakat di Baruga. Temuan ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan merupakan bagian dari tata kelembagaan yang menghubungkan kewenangan pemimpin dengan pertimbangan para pemangku kepentingan dalam lingkungan kesultanan.

Aspek lain yang penting adalah adanya mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Siolimbona memiliki fungsi menjaga adat sekaligus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kemungkinan terjadinya penyimpangan. Dalam praktik historisnya, mekanisme tersebut dapat disertai dengan berbagai bentuk sanksi terhadap pejabat yang dinilai melanggar ketentuan adat dan pemerintahan. Hal ini memperlihatkan bahwa kekuasaan dalam sistem pemerintahan Kesultanan Buton tidak ditempatkan sepenuhnya tanpa pembatas, tetapi berada dalam hubungan dengan norma adat, kelembagaan, dan mekanisme pengawasan.

Kajian mengenai sistem pemerintahan Kesultanan Buton dalam perspektif Sarana Wolio berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, politik lokal, dan kajian kelembagaan tradisional melalui analisis keterkaitan struktur dan fungsi kelembagaan, pembagian kewenangan, penyiapan dan penetapan pemimpin, musyawarah, serta pengawasan kekuasaan. Hasil kajian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan tentang tata kelola berbasis adat dan hubungan norma adat dengan nilai keagamaan. Dari aspek teknologi, kajian ini berpotensi mendukung dokumentasi dan pengarsipan digital mengenai sistem pemerintahan Kesultanan Buton sehingga pengetahuan kelembagaan tradisional dapat dilestarikan, diakses, dan dimanfaatkan untuk pendidikan serta penelitian secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifudin, Muhammad, Moh. Toriqul Chaer, and Fitriah M. Suud. 2020. "Contextualization of The 19th Century Islamic Law in Buton (a Study on Sultan Muhammad Idrus Qaimuddin Thought about Mawaris)." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20(2): 269–87.
- Apurines, Muh. Ide, Muradi Muradi, and Dede Sri Kartini. 2018. "Praktik Pemerintahan Pada Kesultanan Buton Tahun 1540-1960 Masehi." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 14(2): 20–47.

- Ayton, Darshini, Tess Tsindos, and Danielle Berkovic. 2023. *Qualitative Research: A Practical Guide for Health and Social Care Researchers and Practitioners*. Council of Australian University Librarians, Open Educational Resources Collective.
- Dr. Abdul Fattah Nasution, M.Pd. 2023. 1 *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Faharudin, Muhammad Yunus Wahid, Abrar Saleng, and Kahar Lahae. 2022. "The Constitutional Law Values in the Martabat Tujuh Constitution of the Sultanates of Buton." *Journal of Hunan University Natural Sciences* 49(2).
- Ilyas, Husnul Fahimah. 2017. "Sepenggal Warisan Tertulis Di Negeri Buton." *Jurnal Pusaka* 5(1): 125–40.
- Iriani, and Sritirm. 2021. "La Elangi Sultan Buton Ke IV Sritimuryati." *Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah* 19(2): 98–111. <https://ojs.unm.ac.id/Attoriolong/article/view/23912/Sritimuryati%3B Iriani>.
- Muhammad Alifuddin. "Transformasi Islam Dalam Sistem Sosial Budaya Orang Buton : Dosen Jurusan Syariah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari A . Pendahuluan Bagi Orang Buton , Islam Adalah Sebuah Realitas Yang Tak Terelakkan , Sejarah Orang Buton Sebagai Masyarakat Yang Beragama Isl." : 1–23.
- Al Mujabuddawat, Muhammad. 2015. "Kejayaan Kesultanan Buton Abad Ke-17 & 18 Dalam." : 21–32.
- Niampe, La. 2013. "Pengaruh Islam Dalam Kebudayaan Lokal Di Button: Satu Kajian Berdasarkan Teks Sarana Wolio." *EL-HARAKAH (TERAKREDITASI)* 14(2): 243–67.
- Razaq, Abd Rahim, M Jika, and Muharram Hijriah. 2022. "Kesultanan Islam Buton (Tinjauan Historis)." 2(1): 55–65.
- Rosdin, Ali. 2015. "Buton Dan Tradisi Pernikahan." *Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu* 3(1): 45–57. http://journalarticle.ukm.my/8547/1/Buton_dan_tradisi_pernikahan.pdf.
- Sudiyanti, Ahmad Zainal Abidin. 2024. 1 *Metode Penelitian Sosial*.
- Zuhro, R. Siti. 2018. "Demokrasi, Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Indonesia." *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 10(1): 1--41.